LAMPIRAN
MODEL BA.BP DPRD
KABUPATEN

LAMPIRAN BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Partai : Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Daerah Pemilihan : PEMALANG 3

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																	
		Calon 1		Calon 2		Calon 3		Calon 4		Calon 5		Calon 6		Calon 7		Calon 8		Calon 9	
		ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)
1.	Formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS												
2.	Formulir Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	BMS												
3.	Fotokopi KTP Elektronik WNI	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS												
4.	Bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri :																		
	a. Paspor																		
	b. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat																		
5.	Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTb, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS												
6.	Surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS												
7.	Surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS												
8.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS												
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS												
10.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas																		
11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS												
12.	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS												

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																	
		Calon 1		Calon 2		Calon 3		Calon 4		Calon 5		Calon 6		Calon 7		Calon 8		Calon 9	
		ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)
13.	Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) & naskah asli elektronik	ADA	MS	ADA	BMS	TDK ADA	BMS												
14.	Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota/Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/ Anggota Kepolisian/ direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDes badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara*) :																		
	a. Surat pengajuan pengunduran diri																		
	b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri																		
	c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang																		
15.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*) yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya :																		
	a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota																		
	b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri																		
	c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang																		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																	
		Calon 1		Calon 2		Calon 3		Calon 4		Calon 5		Calon 6		Calon 7		Calon 8		Calon 9	
		ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)
16.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*) yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya tetapi yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya.																		
17.	Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS												
18.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana:																		
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap																		
	b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap																		
	c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana																		
	d. bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa																		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																	
		Calon 1		Calon 2		Calon 3		Calon 4		Calon 5		Calon 6		Calon 7		Calon 8		Calon 9	
		ADA/ TDK ADA	MS/ BMS	ADA/ TDK ADA	MS/ BMS	ADA/ TDK ADA	MS/ BMS	ADA/ TDK ADA	MS/ BMS	ADA/ TDK ADA	MS/ BMS	ADA/ TDK ADA	MS/ BMS	ADA/ TDK ADA	MS/ BMS	ADA/ TDK ADA	MS/ BMS	ADA/ TDK ADA	MS/ BMS
19.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara (culpa levis atau karena alasan politik):																		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap																		
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap																		
	c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik																		
	d. bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional.																		
20.	Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan bagi bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat																		
21.	Penetapan dari Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan nama penulisan bakal calon pada dokumen pengajuan/syarat bakal calon dengan nama bakal calon pada KTP Elektronik																		
Kesimpulan :		L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS
		TL	BMS	TL	BMS	TL	BMS												

Keterangan :

L : Lengkap

TL : Tidak Lengkap

MS : Memenuhi Syarat

BMS : Belum Memenuhi Syarat

Pemalang, 18 Juli 2018

Yang Menerima,
Tim Penghubung

(.....)

Yang Menyerahkan,
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pemalang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

(.....)

LAMPIRAN
MODEL BA.HP-DPRD
KABUPATEN

LAMPIRAN BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Partai : Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Daerah Pemilihan : PEMALANG 4

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																	
		Calon 1		Calon 2		Calon 3		Calon 4		Calon 5		Calon 6		Calon 7		Calon 8		Calon 9	
		ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)
1.	Formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS										
2.	Formulir Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS										
3.	Fotokopi KTP Elektronik WNI	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS										
4.	Bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri :																		
	a. Paspor																		
	b. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat																		
5.	Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTb, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS										
6.	Surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah	ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS										
7.	Surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah	ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS										
8.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota	ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS										
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS										

10.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas																		
11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	ADA	DMS	ADA	MS	TDK ADA	DMS	ADA	MS										
12.	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku	TDK ADA	DMS	TDK ADA	MS	TDK ADA	DMS	TDK ADA	MS										
13.	Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) & naskah asli elektronik	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	DMS	ADA	MS										
14.	Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota/Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/ Anggota Kepolisian/ direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDes badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*) :																		
	a. Surat pengajuan pengunduran diri																		
	b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri																		
	c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang																		
15.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*) yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya :																		
	a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota																		
	b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri																		
	c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang																		
16.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*) yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya tetapi yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya.																		

17.	Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	TDK ADA	SMK	ADA	MS	TDK ADA	SMS	ADA	MS										
18.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana:																		
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap																		
	b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap																		
	c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana																		
	d. bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa																		
19.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara (culpa levis atau karena alasan politik):																		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap																		
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap																		
	c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik																		
	d. bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional.																		

20.	Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan bagi bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat																		
21.	Penetapan dari Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan nama penulisan bakal calon pada dokumen pengajuan / syarat bakal calon dengan nama bakal calon pada KTP Elektronik																		
Kesimpulan :		L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS
		TL	BMS	TL	BMS	TL	BMS	TL	BMS										

Keterangan :

L : Lengkap

TL : Tidak Lengkap

MS : Memenuhi Syarat

BMS : Belum Memenuhi Syarat

Pemalang, 18 Juli 2018

Yang Menerima,
Tim Penghubung

(.....)

Yang Menyerahkan,
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pemalang

(.....)

LAMPIRAN
MODEL BA.HP-DPRD
KABUPATEN

LAMPIRAN BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Partai : Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Daerah Pemilihan : PEMALANG 5

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																	
		Calon 1		Calon 2		Calon 3		Calon 4		Calon 5		Calon 6		Calon 7		Calon 8		Calon 9	
		ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)	ADA/ TDK ADA*)	MS/ BMS*)
1.	Formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)	ADA	BMS																
2.	Formulir Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)	ADA	BMS																
3	Fotokopi KTP Elektronik WNI	TDK ADA	BMS																
4.	d																		
	a. Paspor																		
	b. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat																		
5.	Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTb, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	TDK ADA	BMS																
6.	Surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah	TDK ADA	BMS																
7.	Surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah	TDK ADA	BMS																
8.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota	TDK ADA	BMS																
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota	TDK ADA	BMS																

10.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas																		
11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	TDK ADA	ADA																
12.	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku	TDK ADA	ADA																
13.	Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) & naskah asli elektronik	TDK ADA	ADA																
14.	Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota/Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/ Anggota Kepolisian/ direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDes badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*) :																		
	a. Surat pengajuan pengunduran diri																		
	b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri																		
	c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang																		
15.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*) yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya :																		
	a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota																		
	b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri																		
	c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang																		
16.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*) yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya tetapi yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya.																		

17.	Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	TDK ADA	ADA																
18.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana:																		
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap																		
	b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap																		
	c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana																		
	d. bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa																		
19.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara (culpa levis atau karena alasan politik):																		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap																		
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap																		
	c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik																		
	d. bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional.																		

20.	Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan bagi bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat																		
21.	Penetapan dari Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan nama penulisan bakal calon pada dokumen pengajuan/syarat bakal calon dengan nama bakal calon pada KTP Elektronik																		
Kesimpulan :		L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS
		TL	BMS																

Keterangan :

L : Lengkap

TL : Tidak Lengkap

MS : Memenuhi Syarat

BMS : Belum Memenuhi Syarat

Pemalang, 18 Juli 2018

Yang Menerima,
Tim Penghubung

(.....)

Yang Menyerahkan,
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pemalang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

(.....)